



KEPUTUSAN DIREKTUR DISEMINASI STATSITIK BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR B- ld/03200/PS.400/2024

Tahun 2024 TENTANG

KODE ETIK

PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DIREKTUR DISEMINASI STATSITIK,

Menimbang

Mengingat

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Diseminasi Statistik tentang Kode Etik Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 *Nomor* 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549!;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 l Nomor 202);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

1. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
2. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
3. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistík, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

1. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 952).

MEMUTUSKAN:

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR DISEMINASI STATISTIK TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK. |

KESATU

KEDUA

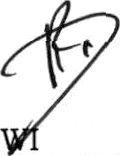
KETIGA

Kode Etik Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan pedoman penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu dan wajib dilaksanakan oleh pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu.

Kode Etik Pelaksana Pelayanan Statistik Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2024 DIREKTUR DISEMINASI STATISTIK

DWI RETNO LUJENG WAHYU UTAMI

LAM PIRAN

KEPUTU SAN DIRKKTU R DISEMINASl STATISTIK

NOMOR B-1 d/03200/PS.400/ 2024

TAHbN 2024

TENTANG KODE KTIK PELAKSANA PE LAYANAN STATl STI K TE RPAD U DI

Ll NGK U NGAN BADAN PUSAT STATISTI K

KODE ETIK PELAKSANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU

**DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**

1. **Nilai-nilai**
   1. Profesional

Merupakan modal dasar yang harus dimili k i oleh setiap Pet o ksana Layanan dalam melaksanakan profesi/ttugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1l Kompeten 2J Efektif

3 J Efisien 4i Inovatif 5 I Sistem ik

 Integritas

Merupakan sikap dan perilak u kerja yang harus dimiliki oleh setiap Pelaksana Layanan dalam pengabdiannya kepada institusi /organisasi, dengan unsur-unsıır sebagai be riku t:

U Dedikasi 2 j D isipi in 3} Kon sisten

1. Terbu ka
2. Akuntabel
3. Aman ah

Merupakan sikap kerja yang harus dimiliki ole h setiap Pelaksana Layanan untuk dipertanggung jawa bkan kepado Tuhan Yang Maha Esa, denga n ıınsur-un sur scbagai berikut:

* 1. Terpercaya
  2. Jujmr
  3. Tıılus

4 J Adil

1. 
   1. Pelaksana Layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan berhak memperoleh Penghargaan.
   2. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana dayanan memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Menaati segala peraturan yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik.
3. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung

jawab.

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pengguna layanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Menerima dengan baik setiap permohonan layanan.
3. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.
4. Memberitahukan dengan sopan dan professional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan.
5. Menyelesaikan pelayanan sesuai jangka waktu penyelesaian pada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
6. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sebagai pelaksana layanan.
7. **Laraiigan**
   1. Meminta sesuatu dari pengguna layanan di luar yang telah ditentukan.
   2. Menerima sesuatu dari pengguna layanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan/atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan.
   3. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan.
   4. Mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pengguna layanan.
   5. Bertindak diskriminatif dalam memberikan layanan.
   6. Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi.
8. **Pcnghargaan**
   1. Penghargaan akan diberikan kepada Pelaksana Layanan yang memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan sesuai ctengan ketentuan den/ atau **kehijakan yang ditetapkan** Deputi Bidang

M etodologi dan Infor mas i Statistik, ata u bentuk penghargaan lainn3 a ya ı g tidak bcrtcn ta ngan denga n pcratura n ya ng bcr laku.

* 1. Pcmbcrian penghargaan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pelaksa na layana n de ngan krite ria scba go i berikut:
     1. Keh adiran pelaksana Iayanan sesuai jam pelayanan yang ditetapkan.
     2. Kinerja pelaksana layanan sesuai s taııdar pelayanan yang ditetapkan.
     3. Kerjas ama pel ak sana layan an dalam tim kerja Pelayanan Statis ti k Ter padu.
     4. lnovatif/ kreatifitas pelaksana layanan mampıı memberikan pelayanan dengan cara yang tidak biasa *out of the bo- .*
     5. Penam pilan pclaksana layanan scsua i budaya pelayanan 3 ang ditetapkan.
     6. Pelayanan Prima, pcla ksa na layanan tida k pcrnah menerima kom plain dari penggıın a layanan.
  2. Penghargaan diberikan da lara ben t uk pi agaın penghargaan, memampang nama yang bersangkutan di runag Pelayanan Statis tik Terpadu dan point tambahan dalam penilaian kinerja tahunan pegawai [SKP|.

1. Hanksi

Sanksi dibcrikan kcpada Pelaksana Layanan yang tidak mematuhi kode etik, proscdur, dan ketentuan lain yang mengatıır pemberian layanan kepada pengguna layanan di Badan Pusat Stati s tik. Pem be rian sanksi sesuai peraturan perun dan gaz yang berlaku untuk Aparatur Sipil Negara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tan ggal 4 Januari 2024 DIREKTUR DISEMINASI STATI STI K

DWI RKTNO JUNG WAHYU UTAM I